

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator untuk dapat menilai kinerja dari pengelolaan keuangan daerahnya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan perangkat kerja daerah yang ada didalamnya. Hal ini disebabkan karena untuk menilai kinerja keuangan daerah dapat dilihat pada penyerapan anggarannya dalam satu periode anggaran yang telah ditentukan. Kondisi dari penyerapan anggaran, baik penyerapan anggaran yang dilakukan pada pemerintah daerah maupun pada perangkat kerja daerahnya hampir mempunyai kondisi yang hampir sama dimana penyerapan anggaran ada yang dilakukan dengan baik dan ada juga penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukannya.

Penyerapan anggaran yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja dari keuangan daerah secara keseluruhan. Karena pada dasarnya penyerapan anggaran ini dilakukan oleh perangkat kerja yang ada di dalam pemerintah daerah tersebut, permasalahan dalam penyerapan anggaran pun biasanya ada pada salah satu ataupun beberapa perangkat kerja pemerintah tersebut, terkadang ada perangkat kerja pemerintah yang penyerapan anggarannya terserap dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukannya, tetapi ada juga perangkat kerja

pemerintah daerah yang tidak melaksanakan penyerapan anggaran dengan tidak baik karena beberapa hal tertentu, tetapi dari hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja keuangan daerah secara keseluruhan karena nantinya pada setiap akhir periode anggarannya akan di konsolidasikan di PPKD yang kemudian disusun menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu penyerapan anggaran yang dilakukan oleh setiap perangkat kerja yang ada di pemerintahan daerah perlu diperhatikan dengan baik, agar penyerapan anggarannya pun dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

Terkadang dalam realisasi penyerapan anggaran masih banyak perangkat kerja pemerintahan dalam penyerapan anggaran tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga nantinya akan berpengaruh pada optimalnya kinerja dari pemerintah. Penyerapan anggaran ini dapat mendorong suatu proses untuk pembangunan sehingga nantinya dapat berpengaruh pada kinerja pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.02/2015 yang terdapat dalam pasal 3 ayat 2 yang didalamnya menyatakan, “Persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95%”, dapat dikatakan bahwa jika persentase dari penyerapan anggaran dibawah 95% dapat dinilai kurang baik juga, misalkan karena disebabkan adanya *mark up* terhadap anggarannya dari anggaran secara wajarnya atau bisa juga disebabkan karena ada beberapa program yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh perangkat kerja pemerintahan tersebut. Tetapi jika persentase penyerapan anggarannya diatas 100% akan bermasalah karena bisa menimbulkan persepsi bahwa kurangnya perkiraan dalam perencanaan anggarannya, sehingga nantinya akan berpengaruh pada pemborosan terhadap penggunaan anggarannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang merupakan bagian dari perangkat kerja pemerintah daerah Kota Bandung yang setiap tahunnya mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kota Bandung untuk dapat menjalannya setiap program dan kegiatan yang akan dilakukannya. Penyerapan anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang dilakukan di Bappelitbang Kota Bandung menjadi tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ada disetiap bidang. Berdasarkan pada hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada tahun 2017 sampai dengan 2018, di mana dalam data tersebut terdapat penurunan persentasi penyerapan anggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Namun penurunan tersebut tidak hanya pada persentasi anggarannya saja, akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 pun terjadi penurunan pada jumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bappelitbang Kota Bandung. Pada tahun 2017 Bappelitbang Kota Bandung telah melaksanakan 16 program dengan 63 kegiatan, sedangkan tahun 2018 hanya melaksanakan 12 program dengan 57 kegiatan. Berdasarkan pada data yang di dapatkan oleh peneliti dari Bappelitbang Kota Bandung yaitu selama dua tahun anggaran pada tahun 2017 - 2018 terdapat selisih antara anggaran yang telah ditentukannya dengan realisasinya, adapun data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada tahun 2017 – 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1**Realisasi Anggaran Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2017-2018**

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2017	Belanja	Rp37.657.300.190	Rp33.836.705.229	89,85
2018	Belanja	Rp39.629.337.998	Rp34.374.539.230	86,74

Sumber: LRA Bappelitbang Kota Bandung

Tabel di atas merupakan data penyerapan anggaran pada Bappelitbang Kota Bandung tahun anggaran 2017 – 2018 yang terdiri dari rekapitulasi belanja keseluruhan, belanja operasi secara keseluruhan dan belanja modal secara keseluruhan pada tahun tersebut. Bisa kita lihat bahwa persentase penyerapan anggaran belanja dari tahun 2017 – 2018 tidak ada yang persentasenya diatas 95%. Berdasarkan tabel di atas bisa kita lihat bahwa pada tahun 2017 untuk komponen belanja secara keseluruhan dianggarkan sebesar Rp. 37.657.300.190, namun pada realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 33.836.705.229 atau setara 89,85% dari total anggaran yang dialokasikannya dengan selilih anggarannya sebesar Rp3.820.594.961. Sedangkan pada tahun 2018 anggaran belanja dianggarkan sebesar Rp. 39.629.337.998 namun realisasi penyerapannya hanya sebesar Rp. 34.374.539.230 atau setara dengan 86,74% dan memiliki selisih sebesar Rp5.254.798.768. Jika dilihat pada persentasenya telah terjadi penurunan persentase dari penyerapan anggarannya, dimana pada tahun 2017 persentasenya sebesar 89,85% sedangkan pada tahun 2018 persentasenya sebesar 86,74%, terjadi penurunan persentase sebesar 3,11%.

Adapun realisasi dari penyerapan anggaran yang terperinci dari komponen belanja operasi dan belanja modalnya yang dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Bappelitbang Kota Bandung dari tahun 2017 – 2018, sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Realisasi Anggaran Belanja Operasi Pada Bappelitbang Tahun 2017-2018

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2017	Belanja Operasi	Rp36.392.761.520	Rp32.649.896.109	89,72
	Belanja Pegawai	Rp16.197.054.237	Rp16.075.369.512	99,25
	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.195.707.283	Rp16.574.526.597	82,07
2018	Belanja Operasi	Rp39.025.881.305	Rp34.174.798.410	87,57
	Belanja Pegawai	Rp21.361.444.435	Rp20.716.355.953	96,98
	Belanja Barang dan Jasa	Rp17.664.436.870	Rp13.458.442.457	76,19

Sumber: LRA Bappelitbang Kota Bandung

Pada tabel di atas kita bisa lihat bahwa pada tahun 2017 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 36.392.761.520 namun pada realisasi penyerapan anggarannya hanya sebesar Rp. 32.649.896.109, jika dipersentasekan hanya terealisasi 89,72%. Sedangkan pada tahun 2018 belanja opera dianggarkan sebesar Rp39.025.881.305 dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 34.174.798.410, jika dipersentasekan penyerapan anggarannya sebesar 87,57%. Jika dilihat persentase realisasi penyerapan anggarannya terjadi penurunan persentasi, dimana pada tahun 2017 persentasenya sebesar 89,72% sedangkan pada tahun 2018 menjadi 87,57%, terjadi penurunan persentase penyerapan anggaran sebesar 2,15%.

Jika dilihat penyerapan anggaran pada komponen belanja pegawai penyerapannya dapat dinilai sudah baik karena penyerapan anggarannya pada tahun 2017 – 2018 persentasenya diatas 95%, pada tahun 2017 belanja pegawai dianggarkan Rp. 16.197.054.237 dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 16.075.369.512, jika dipersentasekan realisasi penyerapan anggarannya sebesar 99,25%. Sedangkan pada tahun 2018 belanja pegawai dianggarkan Rp. 21.361.444.435 dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 20.716.355.953, jika dipersentasekan penyerapan anggarannya sebesar 96,98%. Meskipun persentasenya mengalami penurunan sebesar 2,27% tapi penyerapan anggaran pada komponen belanja pegawai ini dapat dikatakan baik karena penyerapan anggarannya selalu diatas 95%.

Kemudian jika dilihat penyerapan anggaran pada komponen belanja barang dan jasa, pada tahun 2017 belanja barang dan jasa ini dianggarkan sebesar Rp. 20.195.707.283 dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 16.574.526.597, jika dipersentasekan realisasi penyerapan anggarannya hanya 82,07%. Sedangkan pada tahun 2018 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 17.664.436.870 dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 13.458.442.457, jika dipersentasekan realisasi penyerapan anggarannya sebesar 76,19%. Telah terjadi penurunan persentase penyerapan anggarannya dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu sebesar 5,88%.

Tabel 1. 3

Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Bappelitbang Tahun 2017-2018

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2017	Belanja Modal	Rp1.264.538.670	Rp1.186.809.120	93,85
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.139.038.968	Rp1.064.057.500	93,42
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp125.499.702	Rp122.751.620	97,81
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0	Rp0	0
2018	Belanja Modal	Rp603.456.693	Rp199.740.820	33,10
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp492.586.286	Rp199.740.820	40,55
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp0	0
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp110.870.407	Rp0	0

Sumber: LRA Bappelitbang Kota Bandung

Berdasarkan pada tabel di atas kita bisa lihat bahwa pada tahun 2017 belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 1.264.538.670 dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 1.186.809.120, jika dipersentasekan realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,85%. Sedangkan pada tahun 2018 belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 603.456.693 dengan realisasi penyerapan anggarannya hanya sebesar Rp. 199.740.820, jika dipersentasekan realisasi penyerapannya hanya sebesar 33,10%. Terjadi penurunan yang signifikan pada persentase realisasi penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2018, penurunan persentasenya sebesar 60,75%. Jika dibandingkan dengan penurunan persentase pada setiap komponen dalam penyerapan anggaran belanjanya,

penurunan persentase penyerapan anggaran pada komponen belanja modal tahun 2018 ini merupakan persentase penurunan yang paling tinggi.

Pada tahun 2017 belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp. 1.139.038.968 dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 1.064.057.500, jika dipersentasekan sebesar 93,42%. Sedangkan pada tahun 2018 belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp. 492.586.289 dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 199.740.820, jika dipersentasekan hanya sebesar 40,55%. Terjadi penurunan yang signifikan terhadap persentase realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2018 yaitu sebesar 52,87%.

Kemudian pada tahun 2017 belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp. 125.499.702 dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 122.751.620, jika dipersentasekan menjadi 97,81%, penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2017 tersebut dapat dikatakan baik karena persentasenya di atas 95%. Sedangkan pada tahun 2018 belanja modal gedung dan bangunan tidak dianggarkan. Tetapi pada tahun 2018 ada anggaran yang dianggarkan untuk belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 110.870.407, akan tetapi tidak ada realisasi penyerapan anggarannya.

Dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran di Bappelitbang ini belum dikatakan cukup baik, karena berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas kita bisa lihat bahwa rata-rata penyerapan anggarannya di bawah 95%. Bahkan di tahun 2018 terjadi penurunan dari persentase penyerapan anggaran dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai penyerapan anggaran pada Bappelitbang Kota Bandung tahun 2017-2018, dengan penelitian yang berjudul:

PENYERAPAN ANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
BANDUNG TAHUN 2017-2018

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran yang menurun pada Bappelitbang Kota Bandung yang dapat dilihat dari persentase realisasi anggarannya pada tahun 2017-2018.
2. Penyerapan anggaran Bappelitbang Kota Bandung yang dapat dilihat dari realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyerapan anggaran di Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2017-2018 ditinjau dari faktor sumber daya manusia?
2. Bagaimana penyerapan anggaran di Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2017-2018 ditinjau dari faktor faktor administrasi?

3. Bagaimana penyerapan anggaran di Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2017-2018 ditinjau dari faktor kebijakan?

D. Tujuan Penelitian

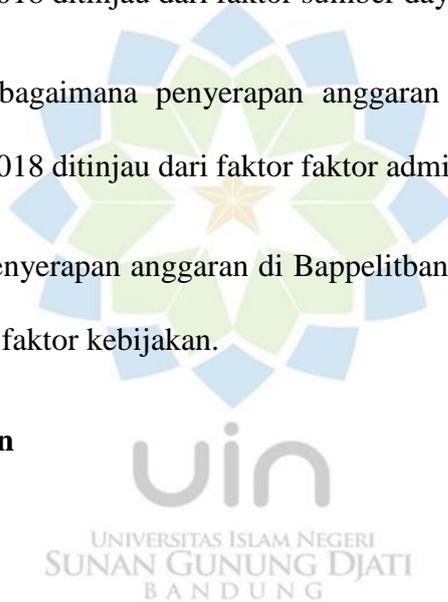
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyerapan anggaran di Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2017-2018 ditinjau dari faktor sumber daya manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyerapan anggaran di Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2017-2018 ditinjau dari faktor faktor administrasi.
3. Untuk mengetahui penyerapan anggaran di Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2017-2018 ditinjau dari faktor kebijakan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan dilakukannya penelitian ini mengenai penyerapan anggaran di Bappelitbang Kota Bandung ini untuk dijadikan sebagai media untuk peneliti agar dapat menggunakan atau mempraktikkan teori yang pernah didapatkan selama perkuliahan berlangsung, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai akuntansi pemerintahan yang merupakan bagian dari ilmu administrasi publik.



2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah untuk menambah pengetahuan. Kemudian kegunaan penelitian ini mengenai penyerapan anggaran pada Bappelitbang Kota Bandung ini sebagai salah satu tugas akhir yang merupakan salah satu syarat peneliti untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.

b. Bagi Instansi

Kegunaan penelitian ini bagi Bappelitbang Kota Bandung dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan masukan mengenai kualitas penyerapan anggarannya. Sehingga hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam penyusunan dari anggaran pada tahun-tahun yang akan datang.

c. Untuk Peneliti Lain

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti lain diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat melakukan penelitian yang mungkin serupa namun secara lebih mendalam lagi.

F. Kerangka Pemikiran

Edward H. Litchfield yang dikutip Syafiie (2010; 24) “Teori Administrasi Publik” administrasi publik adalah suatu studi yang menjelaskan berbagai

macam mengenai badan pemerintahan yang diorganisasikan, dilengkapi dengan sumber daya yang dimilikinya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Faud (2015; 4) “Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah”, mendefinisikan keuangan daerah yaitu:

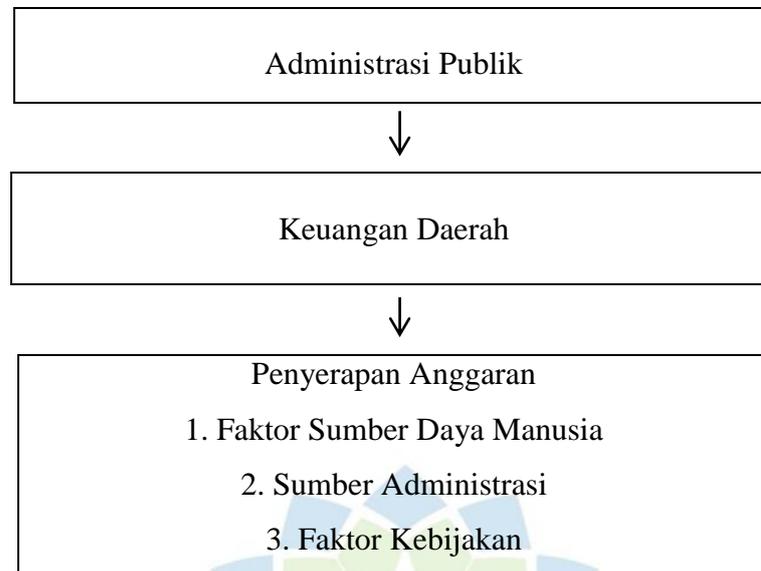
“Suatu proses yang terdiri dari pengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan mengenai suatu transaksi keuangan yang terjadi yang berasal dari organisasi pemerintah daerahnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi yang nantinya dapat digunakan pihak internal maupun eksternal.”

Halim (2016; 92) “Manajemen Keuangan Sektor Publik”, menyatakan bahwa:

“Penyerapan anggaran yang dimaksud disini adalah pencapaian realisasi dari anggarannya. Penyerapan anggaran yang dimaksudkan disini adalah suatu pencapaian dari suatu estimasi yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu waktu tertentu. Penyerapan anggaran juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pencairan atau realisasi dari anggaran yang telah disesuaikan dengan yang dicantumkan dalam LRA pada periode tertentu.”

Perdana Kusuma Negara, Lilik Handajati & Lukman Effendy (2018), penyerapan anggaran dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia
Dalam suatu organisasi manusia memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan dari suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Di sini sumber daya manusia sangat berperan penting untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi.
2. Faktor Administrasi
SKPD pada awal tahun anggarannya biasanya disibukkan dengan persiapan-persiapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan seperti penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan pada SKPD.
3. Faktor Kebijakan
Kebijakan identik dengan pengambilan keputusan oleh pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil setiap keputusan.



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian

G. Proposisi

Berdasar pada kerangka penelitian, penyerapan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2017-2018 dalam pelaksanaannya akan baik jika memperhatikan ketiga faktor ini yaitu sumber daya manusia, administrasi dan kebijakannya dilaksanakan dengan baik.